

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PENGEMBANG TERHADAP PEMBERDAYAAN PETANI PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DI WILAYAH SURABAYA BARAT)

Rikawanto Eko Muljawan

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

rikawanto.em@gmail.com

Abstrak

Pembangunan infra struktur yang diperuntukkan bagi sektor *property*, perindustrian, perdagangan, fasilitas sosial dan pendidikan di wilayah *sub-urban* terjadi secara cepat hampir di seluruh wilayah Jawa Timur, yang dianggap sebagai salah satu propinsi yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang pesat. Implikasi yang terjadi bahwa lahan pertanian menjadi semakin terdesak kurang lebih 100 hektar pertahun beralih fungsi menjadi non pertanian. Implikasi berikutnya adalah semakin berkurangnya persediaan pangan, gizi dan bahan baku industri pertanian serta produk-produk pertanian yang menjadi unggulan Indonesia.

Ditengah cepatnya pembangunan infra struktur, usaha pertanian di perkotaan (*urban farming*) menunjukkan potensi yang semakin berkembang (walaupun berjalan lambat) seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Pada saat ini terdapat 2000 hektar lahan di wilayah Surabaya bagian Barat yang dikuasai pengembang raksasa yang beberapa hektar diantaranya masih diusahakan sebagai lahan pertanian. Pemerintah daerah setempat mencoba pengembangan *urban farming* kepada petani setempat yang tinggal 624 dari 11.568 kk, dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersisa yaitu sekitar 400 ha; serta lahan pekarangan.

Perusahaan pengembang yang berperan besar pada proses alih fungsi lahan yang cukup luas serta mendapatkan benefit yang sangat besar, sudah selayaknya untuk berperan dalam upaya meningkatkan sumber daya pertanian melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana CSR ini dapat berkontribusi terhadap program pening-katan pengetahuan dan teknologi pertanian (*agro eco-technology*) yang terintegrasi dari tiga komponen penting yaitu pertanian organik, pertanian konservasi dan pertanian perkotaan.

Kata kunci : *urban farming*, *agro eco-tech*, hortikultura, CSR, *property*

PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pertanian selalu dikaitkan dengan kegiatan yang sepenuhnya berada di lahan pedesaan. Walaupun dewasa ini kegiatan pertanian sudah dikembangkan menjadi pertanian efisien di perkotaan (*urban farming*). Usaha pertanian

perkotaan dilatar belakangi akibat menyusutnya lahan pertanian, menjadi areal terbangun maupun perencanaan pemukiman perkotaan (*planned unit development*). Dengan berbagai fasilitasnya.

Berdasar data bahwa setiap tahun luas lahan pertanian di Surabaya berkurang sekitar 100 hektar oleh cepatnya pembangunan infra struktur dan *real estate*, lahan untuk kegiatan pertanian pangan tersisa hanya 15.000 hektar, sehingga diperkirakan lahan pertanian di Surabaya akan habis dalam waktu 15 tahun mendatang, hal ini

dikuatkan oleh data pengembang terus melakukan pembangunan perumahan, apartemen, pasar modern, baru baik yang menasar kelas menengah atas maupun menengah bawah dan kawasan industri.

Dengan kondisi tersebut, secara keseluruhan sektor pertanian di Surabaya sudah tidak mampu memberikan kontribusi pada perekonomian wilayah. Sektor ini masih kalah jauh dibanding sektor perdagangan, pariwisata, hotel dan restoran. Data Surabaya dalam Angka 2014 menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,07% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau hanya senilai Rp. 58,96 miliar (Atas Dasar Harga Konstan), mengalami penurunan tajam dibanding sebelumnya sebesar Rp. 78,24 miliar. Dipandang dari segi sosial, bergesernya lahan pertanian ke non pertanian akan berimplikasi terhadap : (a) konstruksi sosial masyarakat; (b) modal sosial masyarakat; (c) sikap, perilaku dan motivasi produktif menjadi konsumtif, (d) perubahan ekologi (mikro, makro); (e) perubahan *demand*; (e) perubahan *supply*; (f) perubahan tata kelola lingkungan dan yang serius adalah (g) kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Usaha pertanian di dalam kota dapat berpengaruh terhadap aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan kota. Pertanian di perkotaan (*urban farming*) mampu memberikan kesempatan masyarakat untuk membuka akses terhadap pangan, peningkatan kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, kenyamanan, kualitas kehidupan, dan kelestarian lingkungan hidup. Studi tentang *urban farming* menunjukkan kaitan dengan permasalahan kesehatan masyarakat, serta untuk mengantisipasi permasalahan ketahanan pangan, banjir, penurunan panas kota, efisiensi energi, kualitas udara, perubahan iklim, hilangnya habitat, dan pencegahan kejahatan.

Peran pertanian kota pada aspek keamanan dan keselamatan pangan dapat dilakukan (a) meningkatkan jumlah makanan yang tersedia bagi keluarga maupun masyarakat yang tinggal di kota (b) dapat diproduksinya buah-buahan, sayur-mayur segar, ikan dan daging untuk konsumen-konsumen kota yang dapat memberikan kontribusi tambahan pendapatan rumah tangga,

pengembangan pertanian kota sebagai upaya pemberdayaan petani tradisional yang masih bertani di lahan-lahan sempit kota, penciptaan lapangan kerja dan usaha baru bagi penganggur serta upaya penanggulangan kemiskinan.

METODE

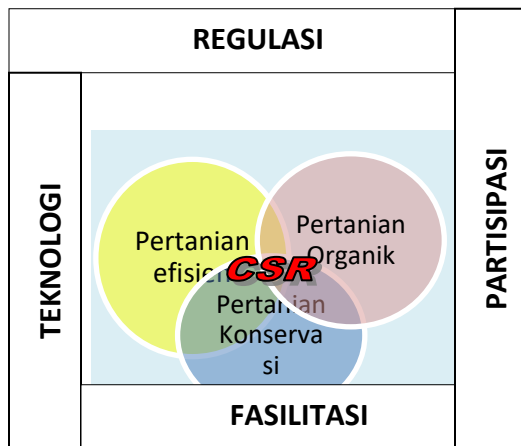
Lokasi penelitian berada di wilayah Surabaya Barat terletak 7°12'-7°19' Lintang Selatan dan 112°36'- 112°42'30'' Bujur Timur. Wilayah Surabaya Barat merupakan wilayah pengembangan kota Surabaya di bidang industri dan perdagangan. Terdapat lima kecamatan berkembang dari tujuh kecamatan di Surabaya Barat yaitu kecamatan Tandes memiliki luas wilayah 1.106,72 ha. kecamatan Benowo dan kecamatan Pakal memiliki luas wilayah 4.579,25 ha, kecamatan Sambikerep dan Lakarsantri 4.267,10 ha.

Dari ketiga Kecamatan yang masuk dalam wilayah Surabaya Barat, kecamatan Sambikerep dan Lakarsantri mengalami proses perubahan tata guna lahan paling menyolok mencapai 610,960 ha dengan perubahan terbesar pada sektor perdagangan dan jasa seluas 279,247 ha dari 2000 ha yang direncanakan untuk kawasan pusat perdagangan, perumahan kelas menengah keatas, dan jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Kota Surabaya. Hasil ini didukung dengan prediksi pada Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Surabaya 2013, yaitu untuk Surabaya bagian barat akan datang menjadi kawasan perdagangan paling besar di Jawa Timur.

Sejak Tahun 2013 kawasan Benowo terdapat areal tambak yang masih cukup produktif walaupun di beberapa lokasi sudah terlihat proses konversi menjadi hunian, kawasan industri, pergudangan, dan juga untuk pengembangan TPA Benowo sesuai dengan hasil penelitian Nufill, 2010, bahwa kecamatan Benowo masuk daerah rawan terhadap ketahanan pangan, pernyataan ini dikuatkan oleh kenyataan terjadinya Perubahan yang paling signifikan kecamatan Sambikerep dan Lakarsantri, di mana di kecamatan ini terdapat kelompok kawasan pengembangan pemukiman perkotaan dan real estate seperti: kelompok

Dharmala, kelompok Pakuwon, dan kelompok Citraland seluas 2000 hektar.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data terintegrasi antar indikator yang menunjukkan : pengembangan pertanian, fasilitasi kepada petani, inovasi teknologi pertanian efisien, pertanian konservasi, pertanian organik. Indikator pendukung tingkat partisipasi berbagai pihak yang berhubungan dengan usaha pertanian. Inovasi teknologi pertanian yang semestinya dapat dikembangkan dengan dukungan dana bantuan perusahaan (*corporate social responsibility*). Integrasi indikator dalam penelitian secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Petani dan Pertanian Tanaman.

Dari data Badan Pusat Statistik, angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Surabaya mengalami penurunan sebanyak 6.454 rumah tangga dari 14.456 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 8.002 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 44,65 persen per tahun. Penurunan terbesar terjadi di kecamatan Wonokromo dan penurunan terendah terjadi di kecamatan Mulyorejo, yaitu masing-masing sebesar -98,56

persen dan -3,75 persen selama sepuluh tahun. Sedangkan Kecamatan yang mengalami kenaikan terbesar adalah Pakal yaitu naik 326,58 persen. Kecamatan Benowo termasuk kecamatan yang mengalami penurunan cukup besar yaitu -72,51%, dari 2.168 menjadi 596 rumah tangga. Dari data angka sebaran rumah tangga tani di atas diduga terjadi urbanisasi lokal dari wilayah kota yang tergusur bergeser ke wilayah pinggiran, demikian juga petani Benowo yang tergusur bergeser ke Kecamatan tetangganya yaitu kecamatan Pakal.

Hal ini sesuai dengan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013, yaitu menuju ke kawasan hunian Citraland, sebaran lahan kosong dan areal pertanian mulai berkurang karena pada lokasi ini pengembangan intensif dan ekstensif justru diperuntukkan bagi hunian massal beserta fasilitas umumnya. Sementara itu pengembangan kawasan urban ke arah Barat tidak begitu pesat, namun pada beberapa kawasan pertumbuhan hunian massal ini terlihat cukup signifikan, khususnya pada pengembangan kawasan hunian pada areal yang dulu diperuntukkan bagi jalur hijau, yaitu Bukit Lidah. Terdapat beberapa kelompok hunian massal yang menempati kawasan Bukit Lidah, yaitu kelompok Dharmala, Bukit Darmo, kelompok Pakuwon, dan kelompok Citraland.

2. Program Pemberdayaan Petani Perkotaan

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menekan angka kemiskinan di Surabaya. Program tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010. Program ini diperpanjang tahun 2011-2015 (Bappeko, 2012). Program pemberdayaan masyarakat Selain berupa bantuan langsung, Program Penanggulangan Kemiskinan juga dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya pertanian perkotaan.

Program pertanian perkotaan merupakan program yang dicetuskan sebagai upaya untuk tetap menjaga kualitas hidup, yaitu dengan tetap dapat mengkonsumsi makanan sehat yang berbahan ikan dan sayur yang berkualitas di

tengah perkotaan. Program ini memang didesain untuk dikembangkan di perkotaan padat yang tidak mempunyai jumlah lahan kosong yang besar. Selain itu, pertanian perkotaan membantu memberikan kontribusi terhadap ruang terbuka hijau kota dan ketahanan pangan.

3. Langkah Mewujudkan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Petani

(a) Mendorong kelompok tani sebagai motor penggerak pembangunan dengan modal yang mereka miliki dengan harapan membuka partisipasi dan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pembangunan. (b) melakukan intensifikasi kembali potensi dan sumber daya yang masih tersisa di desa, dengan memberikan dukungan sarana produksi pertanian yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi Pertanian, program pengabdian dari Tentara Nasional Indonesia. (c) melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan yang ada di sekitar mereka. Ini sangat diperlukan karena masyarakat sebagai sumber informasi sekaligus sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri. (d) membangun kembali interaksi sosial dalam pembangunan ekonomi dalam masyarakat karena modal sosial seringkali diidentikkan dengan pembangunan ekonomi, walaupun dalam kenyataannya pembangunan ekonomi hanya salah satu faktor modal sosial. (e) melakukan inisiasi kembali hubungan sosial di desa. Dengan asumsi bahwa dengan memperkuat hubungan sosial yang ada di desa tentu akan membawa dampak hubungan yang bersifat hierarki dan kekuasaan yang mutlak bagi anggota. (f) lembaga sosial masyarakat sebagai tempat berdiskusi, tukar pengalaman dan pengetahuan.

4. Peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pengembang

Definisi mengenai CSR yang dilontarkan oleh World Bank menterjemahkan CSR sebagai *“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”*. Terjemahan

bebasnya kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang proses pembangunan ekonomi antara perusahaan (pengembang) dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup. Intinya CSR berjalan dengan baik bagi dunia usaha dan pembangunan. CSR forum juga memberikan definisi, *“CSR mean open and transparent business practise that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”*. Bila diterjemahkan secara bebas CSR berarti keterbukaan dan transparan dalam pelaksanaan usahanya yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan penghargaan kepada karyawan-karyawan, masyarakat setempat, dan lingkungan hidup sekitarnya.

Dengan uraian di atas maka Perusahaan pengembang yang telah menikmati keuntungan besar dari proses pengalihan lahan sawah, pekarangan menjadi kawasan perumahan, pusat pertokoan dan perbelanjaan sudah semestinya berkontribusi terhadap pemberdayaan petani setempat yang berubah menjadi petani perkotaan. CSR pengembang semestinya mengambil peran lebih dalam mengembangkan pertanian perkotaan berkelanjutan melalui konsep pengembangan pertanian konservasi, pertanian organik dalam pertanian perkotaan. CSR dalam bentuk dukungan *financial* untuk pelatihan bagi petani, pengembangan lahan pertanian produk unggulan, petak-petak percontohan serta pembelian alat dan mesin sarana produksi pertanian. Hal ini seiring dengan semakin menguatnya prinsip *good corporate governance* di dunia bisnis Internasional, telah mendorong CSR diterapkan dengan sungguh-sungguh, di Indonesia CSR sekarang dinyatakan lebih tegas lagi melalui UU PT No.40 Tahun 2007 yang telah disahkan oleh DPR. Data riil di lapangan menunjukkan bahwa 85% dana CSR pengembang besar dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Surabaya Barat, 12% digunakan untuk program sosial internal perusahaan berupa pembangunan sekolah dan fasilitas sosial untuk user apartemen pengembang, 3% bantuan sosial untuk masyarakat (kampung) sekitar. Dukungan untuk

petani dalam bentuk pinjaman sementara lahan yang belum di bangun (lahan tidur) yang telah di bebaskan. Dukungan pengembang tidak dalam bentuk yang bersifat konstruktif dan tidak menggunakan dana CSR. Sedangkan Pengembang kelas menengah tidak ada data yang menunjukkan telah berkontribusi dalam proses pembangunan wilayah.

5. Peran Perguruan Tinggi

Undang-undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 mengamanatkan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalamnya masyarakat petani. Secara garis besar tujuan pengabdian masyarakat oleh civitas Perguruan Tinggi adalah : (1) melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, (2) mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, (3) meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, (4) memberikan solusi terhadap kebutuhan serta persoalan yang dihadapi serta tantangan berdasar kajian akademik, (5) melakukan kegiatan yang pemberdayaan masyarakat di semua strata dalam bidang ekonomi (pertanian), sosial, budaya, (6) mendorong terjadinya transfer teknologi bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Perguruan tinggi dapat berperan pada pengembangan pertanian perkotaan bersama dengan berbagai pihak melalui alih teknologi pertanian efektif, pertanian organik dan pertanian konservasi.

KESIMPULAN

Pertanian Perkotaan menjadi salah satu kebijakan pertanian kota Surabaya, dengan menggerakkan semua komponen masyarakat, Perusahaan pengembang yang berkontribusi besar terhadap alih fungsi lahan pertanian sudah seharusnya mendukung pengembangan dan alih

teknologi pertanian perkotaan menggunakan dana CSR, demikian juga Perguruan Tinggi dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat (petani) melalui berbagai skim Pengabdian Masyarakat yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristek dikti Republik Indonesia.

SARAN

Perlu regulasi Pemerintah Daerah yang secara tegas mendorong perusahaan dalam upaya pengembangan petani perkotaan menggunakan dana CSR, sesuai dengan UU PT No.40 Tahun 2007 serta diperlukan program yang lebih konstruktif dan sistematis Perusahaan Pengembang, Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi terkait pengembangan sektor pertanian.

BAHAN RUJUKAN

- Anonymous*, 2013. Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Hasil Sensus Pertanian 2013 Kota Surabaya. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Eko Budi Santoso, Rini Ratna Widya, 2014. Gerakan Pertanian Perkotaan Dalam Mendukung emandirian Masyarakat Di Kota Surabaya. Seminar Nasional Cities. Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya. 11 h.
- Hanani, Nuhfil. 2009. Sumbangan Pemikiran Arah Pembangunan Ketahanan Pangan. Makalah dipresentasikan dalam Round Table Discussion "Strategi Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Petani" pada Tanggal 23 Juni 2009 di Surabaya.
- Hanani, Nufil. 2009. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Kota di Propinsi Jawa Timur (Food Insecurity Analysis in Urban Area of East Java). HABITAT Volume XX No. 1 Bulan April 2009.
- Paulian. 1986. *Vedemekom* Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan. Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan.
- Filemon A. Uriarte, Jr., 2008. Corporate Social Responsibility in ASEAN. LCF CSR CONFERENCE 2008. Manila, Philippines. 16-18 July 2008

Prenita Septa Rianelly , Teguh Hariyanto , Inggit Lolita Sari, 2013. Analisa Perubahan Tata Guna Lahan Wilayah Surabaya Barat Menggunakan Citra Satelit Quickbird Tahun 2003 Dan 2009. 10 h. dirilis dari <http://digilib.its.ac.id/public/its-paper-19331-3507100024-paper.pdf>